

Sumber: <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=163203&actmenu=46>

Analisis ==Ayat-ayat Krisis UKM

Oleh:Mudrajad Kuncoro

12/05/2008 22:53:25 **UKM (kini)** bukan lagi Usaha Kecil dan Mikro tapi Usaha Kami Meh Mati. Ini terlontar dari pengakuan pelaku UKM, baik yang mengadu pada Tim Ad-hoc/Jogja Rescue Team, maupun hasil observasi ke berbagai sentra industri di DIY. UKM DIY berada dalam bayang-bayang krisis.

Hasil telaah Tim Ad-hoc bentukan Gubernur DIY yang disiarkan kepada pers (KR, 5/5) menunjukkan kondisi UKM DIY pasca gempa Mei 2006 masih amat memprihatinkan. Posisi kredit UKM pada bank/pemberi pinjaman semakin buruk. Data dari 20 Juni 2006 sampai dengan Oktober 2007 posisi kredit yang bermasalah semakin memprihatinkan. Tak kurang ada 17.526 kredit UKM yang terancam bermasalah, dengan nilai kredit mencapai Rp 328 miliar. Kendati nilai agunan mencapai Rp 884 miliar, dengan penurunan nilai aset sekitar 20-45%, kondisi kolektibilitas kredit UKM jelas mengkhawatirkan. Kredit UKM yang termasuk lancar menurun drastis dari 27% menjadi 1%. Kendati kredit yang tergolong dalam perhatian khusus menurun dari 26% menjadi 19%, kredit kurang lancar naik dari 8% menjadi 9%, kredit diragukan naik dari 9% menjadi 11% dan kredit macet melonjak drastis dari 10% menjadi 31%. Bahkan yang termasuk dalam kategori 'tidak ada keterangan' diperkirakan juga bermasalah karena cenderung meningkat dari 20% menjadi 29%.

Penelusuran saya bersama tim peneliti terhadap 4.500 kredit UMKM korban gempa menunjukkan bahwa ada sekitar 47% yang direstrukturisasi, 19% tidak direstrukturisasi dan sisanya malah tidak memiliki keterangan. Perlu digarisbawahi, sebenarnya program restrukturisasi kredit di DIY tidak mengatasi permasalahan pokok karena kredit bermasalah meningkat dari 64% pada 2006 menjadi 83% pada 2007. Kondisi UKM yang tidak direstrukturisasi malah lebih parah, kredit bermasalahnya meningkat dari 54,5% menjadi 96%.

Angka-angka dan fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meski sudah ada upaya pemulihan UKM ternyata hasilnya belum seperti yang diharapkan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sudah melayangkan surat kepada Menteri Negara BUMN dan Menko Perekonomian agar melakukan rescheduling, injeksi pinjaman, penangguhan eksekusi jaminan bagi UKM korban gempa, ataupun permohonan kepada Dirjen Kekayaan dan Lelang Negara untuk menunda lelang terhadap jaminan nasabah UKM. Namun, agaknya belum cukup ampuh mengerem laju penurunan kinerja UKM maupun menghentikan penyitaan terhadap aset jaminan UKM. Hampir tiap hari, Tim Ad-hoc masih menerima pengaduan dari UKM tentang ancaman debt collectors dan penyitaan aset UKM.

Kebijakan restrukturisasi kredit belum cukup jika tidak disertai 'bantuan teknis' untuk mempercepat pemulihan, seperti pendampingan dan pelatihan. Saat ini yang paling dibutuhkan pelaku UKM dengan kredit bermasalah adalah modal segar agar bisa segera

bangkit. Diperkirakan hanya 45% UKM yang bisa bangkit sendiri, sisanya sulit pulih karena mayoritas tempat tinggal mereka digunakan pula sebagai tempat usaha.

Dalam konteks inilah, saya mengusulkan perlunya program aksi yang koheren dan integratif antara lembaga-lembaga yang terkait dengan UKM. Di tingkat Pemda, program aksi yang dapat dilakukan adalah membantu penyelesaian kredit bermasalah, terutama untuk kredit mikro dengan maksimal kredit Rp 5 juta. Pemda propinsi dan kabupaten/kota dapat meminta pihak perbankan baik pemerintah maupun swasta dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan), Lembaga Leasing, maupun KUD (Koperasi Unit Desa), supaya tidak melakukan eksekusi, penyitaan atau pelelangan aset-aset terkait tunggakan UKM.

Di tingkat pusat, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga harus melakukan penyempurnaan PBI No 8/10/2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank pasca gempa. Perlu PBI khusus untuk UKM pasca bencana yang mencakup gempa, banjir, tsunami, lumpur panas dan lainnya. Selain itu perlu pula disusun suatu kebijakan khusus tentang penyelesaian kredit bermasalah khususnya standar prosedural bagi UKM di daerah bencana, yang pro-UKM.

Menko Perekonomian, Meneg BUMN, Meneg UMKM dan Menteri Perindustrian perlu segera mengeksekusi kebijakan yang supportive terhadap UKM. Menko Perekonomian harus menyusun skema anti-disaster measures bagi UKM untuk daerah bencana baik bencana kecil maupun bencana besar. Skema ini pernah dilakukan Pemerintah Jepang dalam White Paper 2001 dengan nama safety net guarantee program, yaitu kebijakan pemerintah untuk melindungi UKM dari kebangkrutan dengan menyediakan jaring pengaman kredit bagi para UKM. Selain itu, diperlukan penyempurnaan konsep dan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UKM di daerah bencana, yang tentunya harus berkoordinasi dengan Meneg UMKM dan Menteri Keuangan.

Sebagai pendukung kebijakan Menko Perekonomian, Meneg BUMN dapat mempercepat implementasi haircut kredit UKM di bank BUMN dan mengusahakan adanya kredit tanpa agunan maksimal Rp 20 juta bagi UKM. Hal ini dapat dilakukan dengan merealokasi Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan dari BUMN, yang tiap tahun tidak pernah terserap 100%. Dengan percepatan implementasi ini setidaknya UKM dapat kembali bergeliat dan memiliki motivasi untuk kembali produktif. Namun tentunya hal ini harus diimbangi dengan program-program pemulihan sentra-sentra industri kecil sebagai basis pertumbuhan UMKM. Di sinilah Menteri Perindustrian dapat berperan serta dengan menyusun program pemulihan sentra industri.

Dana dan program dari negara donor perlu difokuskan untuk pemulihan livelihood (baca: sektor ekonomi produktif), khususnya UKM. Java Reconstruction Fund perlu menitikberatkan program pemulihan dan penyelamatan UKM bermasalah. Hasil kajian Tim Ad-hoc dan UNDP untuk identifikasi sentra dan profil UKM per kecamatan dapat langsung dimanfaatkan bagi semua stakeholders yang peduli dengan nasib UKM.

Inilah saatnya berlomba-lomba membantu UKM DIY. Rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat ini dapat semakin memukul bisnis UKM. 'Ayat-ayat krisis' UKM ini perlu segera dicari solusinya. Semoga ekonomi kerakyatan tidak hanya angin surga, yang hanya nyaring dinyanyikan saat kampanye pilkada/pemilu. UKM membutuhkan aksi bukan janji.

(Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM;
anggota Tim Ad-hoc DIY)-z